BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik luar negeri Amerika Serikat (AS) mengalami perubahan paling dramatis di awal abad dua satu ketika terjadi peristiwa serangan 11 September 2011 terhadap gedung World Trade Centre dan Pentagon. Cara pandang AS, baik terhadap keamanan, ekonomi-politik, hingga hak asasi manusia mengalami perubahan paling signifikan yang pernah terjadi sejak Perang Dingin berakhir.[1]

George W. Bush, presiden AS kala itu, memandang peristiwa 9/11 tidak hanya sebagai serangan teroris yang mengancam keamanan nasional AS tetapi sekaligus tantangan terhadap perang secara global. Bush mengatakan: "*The deliberate and deadly attacks which were carried out yesterday against our country were more than acts of terror. They were acts of war.*" Lebih lanjut dia menegaskan:

> *The United States of America is fighting a war against terrorists of global reach. The enemy is not a single political regime or person or religion or ideology. The enemy is terrorism—premeditated, politically motivated violence perpetrated against innocents.*[2]

Untuk menjaga kepentingan nasionalnya sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dunia, AS dibawah kepemimpinan Bush kemudian

---

[1] Stephen M. Walt, 2002, "Beyond Bin Laden: Reshaping U.S. Foreign Policy" dalam *America and the World, Debating the New Shape of International Politics*, New York: Council and Foreign Relations Inc., hal. 320.

[2] Dale T. Snau, "The Bush Doctrine and Just War Theory", diakses melalui http://www.trinstitute.org/ojpcr/6_1snau.pdf [diunduh 20 Juli 2011]

mengeluarkan "Doktrin Bush". Di hadapan kongres AS, 20 September 2001, Bush mengeluarkan ancaman kepada dunia internasional dengan menegaskan, *"either you with us or you are with the terrorist"*. Ia juga mengatakan, *"if you are not with us, you are against us"*. Pernyataan ini jelas-jelas memaksa negara-negara lain di dunia untuk menentukan sikap. Dunia, dalam pandangan AS, seolah terbagi menjadi dua kubu: teroris atau bukan teroris.[3] AS di bawah Bush kemudian memimpin dunia dalam sebuah kampanye besar yang ia sebut sebagai "war on terrorism". Atas dasar ini pula operasi militer di Afganistan mendapatkan legalisasi, sebagai tujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional AS.

Tidak lama waktu berselang, tepatnya pada tahun 2002, Bush mengumumkan doktrin *preemption* dalam pidatonya di hadapan lulusan Akademi Militer West Point. Doktrin yang juga dikenal dengan istilah *Preemptive Military Strikes Doctrine* ini adalah kebijakan yang merupakan bagian dari strategi keamanan Amerika Serikat dalam upaya menjaga kepentingan nasionalnya. Doktrin inilah yang kemudian membuka jalan menuju invasi Amerika ke Irak tahun 2003.[4]

Namun demikian kampanye global AS dalam memerangi terorisme melahirkan banyak kontradiksi, mengingat kebijakan AS tersebut, terutama dengan melancarkan invasi ke Afganistan, kemudian selanjutnya disusul ke Irak, dan berujung kepada penangkapan begitu banyak orang-orang yang dianggap pelaku teror, menuai banyak kritik. Di dalam negeri AS sendiri, walaupun Bush

---

[3] Micahel Byers, "Terrorism: The Use of Force and International Law After 11 September", *International Relations Journal*, Vol. 6. No. 2, New York: Prentice Hall Inc., hal. 155.
[4] G. Jonh Ikenberry, 2007, "America's Imperial Ambitions" dalam *American Foreign Policy Theoretical Essay*, Edisi ke-4, New York: W.W. Norton dan Compagny, Inc., hal. 575.

menuai banyak pendukung namun tidak sedikit yang menolak kebijakan luar negeri AS tersebut. Di dunia internasional dukungan datang dari sekutu-sekutu AS yang loyal, namun banyak pihak kemudian melihat betapa buruknya dampak yang dihasilkan dari kebijakan utilitarian tersebut. Salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah kebijakan AS yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Isu pelanggaran HAM begitu terasa dalam kebijakan AS, terutama sebelumnya di mana AS telah menerbitkan Patriot Act langsung setelah tragedi 9/11. Semangat dari Patriot Act ini adalah untuk melindungi kepentingan nasional AS dari ancaman terorisme, namun dampak dari semua itu adalah dirampasnya kebebasan sipil. Kampanye global AS melawan teror dengan dukungan Patriot Act ini membuat AS mengeluarkan kebijakan yang utilitarian demi mencapai keaman nasionalnya.

Tak pelak kampanye global AS menimbulkan aneka ragam persoalan HAM. Walaupun mendapat banyak kritik dan penolakan atas kebijakannya terhadap Afganistan pada tahun 2002, kemudian invasi ke Irak tahun 2003, namun pemerintahan Bush mengabaikan semua kritik tersebut, bahkan ketika PBB dengan jelas menegaskan bahwa kebijakan AS ke Irak sebagai misi yang illegal. AS tetap bergeming di tengah jatuhnya begitu banyak korban jiwa, baik pasukan AS sendiri maupun masyarakat sipil di Afganistan dan Irak.[5]

Selain itu sejak kejatuhan pemerintahan Taliban di Afganistan, pasukan pimpinan AS telah menangkap dan menahan ribuan orang dan warga negara asing

---

[5] Usman Hamid, "Bush dan Problem Global HAM", *Kompas* Edisi Selasa 14 November 2006.

lain di seluruh. Fasilitas penahanan AS yang utama di adalah di pangkalan udara Bagram. CIA juga menahan tahanan yang tak jelas jumlahnya, di pangkalan udara Bagram dan lokasi lain di Afghanistan, termasuk di Kabul. Ada banyak laporan tentang pelanggaran HAM oleh personel militer dan intelijen AS di Afghanistan. Menurut Human Rights Watch, personel militer dan intelijen AS di Afghanistan juga melakukan sistem interogasi yang meliputi penggunaan deprivasi tidur, deprivasi indera, dan memaksa tahanan untuk duduk atau berdiri dalam posisi yang menyakitkan untuk periode waktu yang lama. Dalam hal ini, AS telah gagal memberi penjelasan yang cukup atas tuduhan perlakukan buruk terhadap tahanan oleh personel militar dan intelijen AS di Afghanistan.

Selain itu juga, terungkap skandal penjara Abu Garib dan Kamp Guantanamo. Sejak 2002 Kamp Guantanamo telah menjalankan perannya sebagai penjara militer dan kamp interogasi dan menahan lebih dari 775 tahanan dari 44 negara dan kebanyakan orang-orang yang dicurigai oleh pemerintahan AS sebagai operatif Al-Qaeda dan Taliban; terlebih, penggunaaan Guantanmo sebagai penjara militer telah diserang oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia dan para pengritik lain, yang mengutip laporan-laporan bahwa para tahanan telah disiksa atau diperlakukan secara kejam. Tak pelak terungkapnya skandal ini semakin menampar wajah AS yang justru selama ini getol memperjuangkan HAM dan mempromosikan HAM. Dengan alasan HAM, pemerintahan AS tak jarang menekan Negara-negara lain untuk mengikuti desain dan kemauannya.

Karena itu, melihat realitas yang terjadi organisasi HAM seperti Human right watch mengecam praktik pelanggaran HAM yang telah terjadi pada era

pemerintahan Bush. Hal itu tertuang dalam pernyataan Brad Adams, Direktur Eksekutif Human Right Watch, edisi 8 maret 2004, "AS telah memberikan suatu contoh yang sangat mengerikan dalam menangani tahanan di afganistan. Mereka menahan rakyat sipil di suatu tempat tanpa pengadilan, tanpa pengacara, tanpa izin kunjungan bagi sanak saudara, dan tanpa perlindungan hukum."[6]

AS di awal abad dua satu ini menjadi negara *super power* dengan citra buruk, terutama terkait isu HAM. Simpati yang begitu banyak diberikan kepada AS pasca serangan 9/11 seolah sirna dengan citra buruk kebijakan agresif AS di Afganistan dan Irak, serta perilaku-perilaku AS dalam menangani para kelompok dan orang-orang yang dianggap terselibat terorisme sebagaimana terungkap dalam kasus Abu Garib dan Guantanamo.

Namun demikian perubahan kebijakan dan cara pandang AS terhadap politik global, terutama terkait isu HAM, mengalami perubahan cukup penting setelah lengsernya Bush dan terpilihnya Barrack Obama sebagai presiden AS di tahun 2009. Seolah ingin mengembalikan citra AS sebagai negara demokrasi dan penegak HAM, pemerintahan presiden AS Obama bergerak cepat dengan terus mengampanyekan penegakan HAM dan demokrasi. Kebijakan luar negeri AS di bawah Obama, melalui Doktrin Obama, ingin mengembalikan kepada kebijakan yang pro terhadap HAM.[7]

Terkait Afganistan, misalnya, dalam waktu singkat setelah Obama dilantik ia langsung memerintahkan untuk meninjau kembali situasi di Afganistan. Ia

---

[6] "Negara Promotor HAM dan Pelanggar HAM," *Kompas* Edisi 24 Februari 2005.
[7] Amitai Etzioni, 2010, "Obama's Implicit Human Rights Doctrine" diakses melalui http://icps.gwu.edu/files/2011/02/obama-human-rights.pdf [diunduh 20 Juli 2011].

menegaskan bahwa tujuan utama AS adalah untuk mengalahkan Al Qaeda dan karena itu AS harus membantu rekonstruksi Afganistan yang selama ini telah porak-poranda.[8] Begitu juga kebijakan Obama terkait perlakukan AS selama ini terhadap pelaku yang dianggap terlibat terorisme. Obama, misalnya, langsung meluncurkan penyelidikan kriminal atas interogasi brutal terhadap tersangka teroris oleh badan pusat intelijen AS (CIA) semasa presiden Bush berkuasa. Selain meluncurkan penyelidikan kriminal, obama juga memerintahkan perubahan pada metode interogasi pada masa mendatang. Interogasi akan mengikut sertakan badan-badan lain selain CIA di bawah arahan Biro Investigasi Federal (FBI).[9] Obama yang semenjak menjadi anggota Senat sudah melancarkan banyak kritik terhadap kebijakan utilitarian AS di Afganistan dan Irak seolah ingin mengakhiri sejarah buruk AS di dua negara yang sedang limbung tersebut.

Selain itu, terkait hubungan AS dengan dunia Islam, yang selama ini cukup berjarak menyusul kampanye AS di bawah Bush yang sarat dengan benturan antar peradaban Barat dan Islam, Obama langsung menegaskan bahwa AS bukanlah musuh Islam, begitu juga sebaliknya. Dalam pidatonya di Kairo, Obama mengatakan:

> *I made clear that America is not—and never will be—at war with Islam. We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security—because we reject the same thing that people of all faiths reject: the killing of innocent men, women, and children.*[10]

---

[8] Amitai Etzioni, 2010, "Obama's Implicit Human Rights Doctrine" hal. 7, diunduh melalui http://icps.gwu.edu/files/2011/02/obama-human-rights.pdf [29 Juli 2011].
[9] "Penyiksaan oeh CIA Diselidiki", *Kompas* Edisi 26 Agustus 2009.
[10] Barack Obama, 2009a, "Remarks by the President on a New Beginning," diakses melalui http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Cairo-University-6-04-09/ [diunduh 20 Juli 2011].

Terkait isu HAM, Obama juga dengan tegas menentang cara-cara represi dalam menegakkan HAM. Ia mengatakan:

> *The promotion of human rights cannot be about exhortation alone. At times, it must be coupled with painstaking diplomacy. I know that engagement with repressive regimes lacks the satisfying purity of indignation. But I also know that sanctions without outreach—condemnation without discussion—can carry forward only a crippling status quo.*[11]

Perubahan kebijakan dan cara pandang AS khususnya terhadap isu HAM ini patut mendapatkan perhatian serius. Adanya perubahan kepemimpinan dari Bush ke Obama memang menjadi *turning point,* namun perlu dilihat lebih jauh mengapa perubahan tersebut terjadi dan apa saja yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Karena itu penelitian ini ingin mengelaborasi lebih jauh perubahan kebijakan dan cara pandang AS tersebut setelah Obama terpilih sebagai presiden AS menggantikan Bush.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan deskripsi yang sudah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis coba untuk teliti adalah : **Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perubahan Cara Pandang Amerika Serikat Terhadap Isu Hak Asasi Manusia (HAM) Setelah Barrack Obama Terpilih Sebagai Presiden Amerika Serikat.**

---

[11] Barack Obama, 2009b, "Remarks by the President at the Acceptance of the Nobel Peace Prize", Diakses melalui http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-acceptance-nobel-peace-prize/ [diunduh 20 Juli 2011].

C. Kerangka Teori

Untuk membuktikan hipotesa tentang objek yang sedang diteliti, maka penulis akan menggunakan kerangka teoritik *Teori Persepsi.* Dengan kerangka teori tersebut, penulis berharap maksud dan tujuan dari penelitian ini bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Mengenai teori ini Walter S. Jones mengatakan bahwa seseorang, kelompok atau negara dalam memandang suatu realitas berdasarkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh yang kemudian disesuaikan dengan kepentingan kelompok atau negera tersebut.

Tiga komponen yang membentuk persepsi seseorang, kelompok, ataupun negara, yaitu; nilai, keyakinan, dan pengetahuan.[12] Nilai adalah preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibanding realitas lainnya. Contoh, sehat lebih baik dari sakit, kaya lebih enak dari pada miskin, dan seterusnya. Nilai memberikan harga relatif kepada objek dan kondisi.

Keyakinan adalah sikap bahwa suatu deskripsi realitas adalah benar, terbukti, atau telah diketahui. Keyakinan sering didasarkan pada penerimaan informasi yang sebelumnya dari lingkungan ("Saya telah mendengar bahwa..."), meskipun hal itu tidak sama dengan data itu sendiri. Ini adalah suatu pernyataan analitis yang menghubungkan satuan-satuan data ke dalam suatu pola "yang telah teruji". Sebagai contoh; pemerintahan demokratik kurang menyukai perang seperti halnya pemerintahan totaliter; imperialisme adalah tahap kedewasaan kapitalisme

---

[12] Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional: Persepsi Nasional I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1992, hal. 276.

monopoli. Keyakinan tidak sama dengan nilai. Seseorang mungkin percaya bahwa komunisme akan memacu laju pertumbuhan ekonomi dan bahwa kapitalisme lebih baik menjanjikan perlindungan kebebasan individu. Keyakinan seseorang terbentuk dari nilainya yang menentukan mana yang lebih antara kapitalisme atau komunisme.

Sedangkan pengetahuan bersumber dari data atau informasi yang diterima dari lingkungan. Contoh, Amerika menjual pesawat-pesawat tempur kepada Arab Saudi. Pengetahuan adalah unsur kunci dalam pembentukan dan perubahan sistem perseptual. Konsep perubahan persepsi seseorang atau negara mengacu pada pengetahuan baru yang merombak keyakinan dan nilai.

Persepsi memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu Negara. Jadi, orang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka "ketahui". Tanggapan seseorang pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara orang memandang "kenyataan".[13]

Bagaimana hubungan antara citra, persepsi dan perilaku internasional? Bruce Russet dan Harvey Starr menjelaskan sebagai berikut.[14] Tahap pertama dalam proses pembuatan keputusan luar negeri adalah timbulnya suatu situasi, yaitu timbulnya suatu masalah. Tetapi sebelum situasi itu muncul untuk ditanggapi oleh pembuat keputusan, ada tiga hal yang terjadi. Pertama, pasti ada semacam stimulus atau rangsangan dari lingkungan, yang disebut "*triger event*".

---

[13] Mohtar Mas'oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi,* Yogyakarta: PAUSS-UGM, 1989, hal.19

[14] Bruce Russet dan Harvey Starr, *World Politic: Menu for Choice,* Freeman, 1985, bab 12.

Kedua, tentu ada upaya mempersepsi stimulus itu. Ini adalah proses yang diterapkan oleh individu untuk menyeleksi, menata dan menilai informasi yang masuk tentang dunia sekitarnya. Ketiga, harus ada upaya menafsirkan stimulus yang telah dipersepsi itu. Persepsi dan penafsiran itu sangat tergantung pada citra yang ada dalam benak si pembuat keputusan.

Para pembuat keputusan dipengaruhi oleh berbagai proses psikologi yang mempengaruhi persepsi itu, misalnya untuk merasionalisasikan tindakan, untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan, dan lain sebagainya. Ole R. Holsti membuat diagram yang menggambarkan persepsi dan hubungannya dengan citra dan sistem keyakinan seperti berikut.[15]

Gambar I.1

Hubungan antara sistem keyakinan dengan pembuatan keputusan politik luar negeri.

(Ole R. Holsti, *The belief System And National Image: A case Study*)

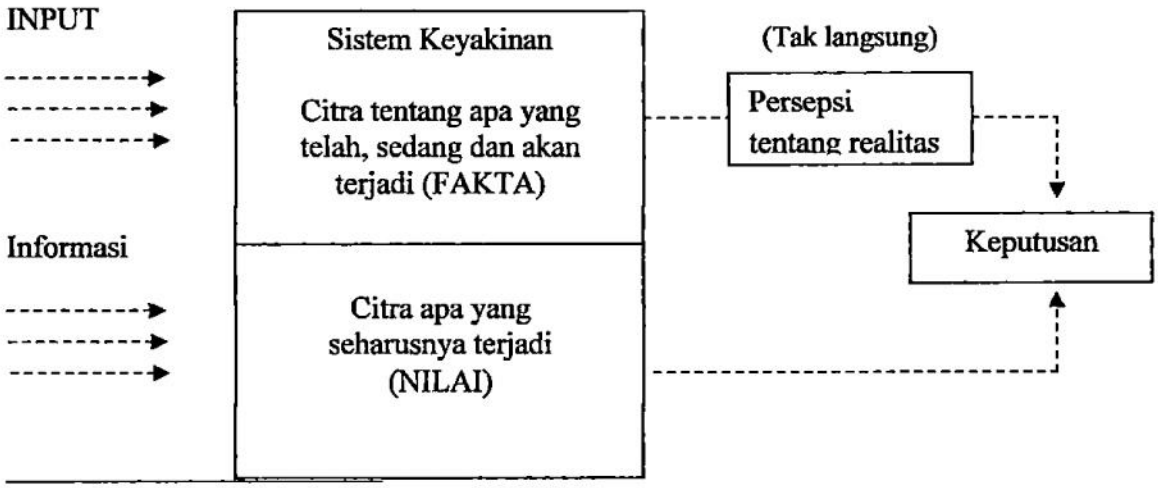

[15] Ole R. Holsti, *The Belief System and National Images : A Case Study*, Dikutip Dalam Mohtar Mas'oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*, Yogyakarta: PAUSS-UGM, 1989, hal.21.

Selanjutnya, bagaimana citra seseorang mempengaruhi persepsinya tentang dunia sekitarnya. Mula-mula nilai dan keyakinan seseorang membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan. Kemudian berdasar sikap dan citra yang telah dipegangnya selama ini, stimulus itu diinterpretasikan. Setiap orang hanya memperhatikan sebagian saja dari dunia sekitarnya, dan setiap orang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk. Persepsi, yang didasarkan pada citra yang sudah ada sebelumnya, adalah proses seleksi. Sistem keyakinan adalah sekumpulan keyakinan, citra atau "model" tentang dunia yang dianut oleh seseorang. Menurut Holsti, *"sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhankerangka acuan atau sudut pandang seseorang. Citra-citra itu meliputi realitas masalalu, masakini dan realitas yang diharapkan di masa depan, dan prefensi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi"*. Jadi, sistem keyakinan menjalankan peran yang sangat penting bagi seseorang. Sistem keyakinan itu membantunya berorientasi terhadap lingkungan, mengorganisasikan persepsi sebagai penuntun tindakan, menentukan tujuan dan bertindak sebagai saringan dalam menyeleksi informasi dalam setiap situasi.[16]

Dengan menggunakan kerangka teoritik ini, penulis kemudian akan mencoba menelusuri bagaimana perubahan cara pandang AS dalam isu HAM yang pada kenyataannya dipengaruhi persepsi presiden Obama selaku kepala negara. Nilai-nilai apa saja yang mempengaruhi persepsi Obama tersebut,

---

[16] *Ibid*

bagaimana dia merespon suatu kejadian yang berkaitan dengan isu HAM, serta sikapnya yang kemudian menjadi kebijakan-kebijakan Amerika.

Obama sebagai pribadi memperlihatkan adanya pandangan-pandangan positif terkait dengan HAM. Obama dikenal sebagai pribadi yang bersahabat, humoris dan menghargai perbedaan. Meskipun demikian, Obama adalah orang yang dikenal sangat gigih, ulet, tekun dan pintar dalam strategi. Obama yang merupakan keturunan kulit hitam, sangat menghargai keberadaan dan keberagaman dalam bingkai multiras dan multietnik di Amerika. Pandangan ini tidak terlepas dari lingkungan di mana Obama hidup. Dalam konteks agama, misalnya, keluarga Obama tidak seratus persen pemeluk agama Kristen. Terdapat beberapa leluhur terdekatnya yang memeluk agama Islam. Bagi Obama, agama bukanlah suatu hal yang harus dipaksakan, dan agama adalah sumber harapan.

Dengan latar belakang seperti itu, ketika obama merespon isu-isu yang berkaitan dengan HAM internasional, dia cenderung memiliki informasi yang lebih lengkap. Dengan nilai-nilai seperti lebih menghargai perbedaan yang dipercayainya, Obama cenderung memilih tindakan yang tidak disertai kekerasan dan mengedepankan dialog. Sebagai kepala negara, Obama menjadikan HAM sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan luar negeri.

Gambar I.2

Aplikasi Hubungan Antara Sistem Keyakinan Dengan Pembuatan Keputusan

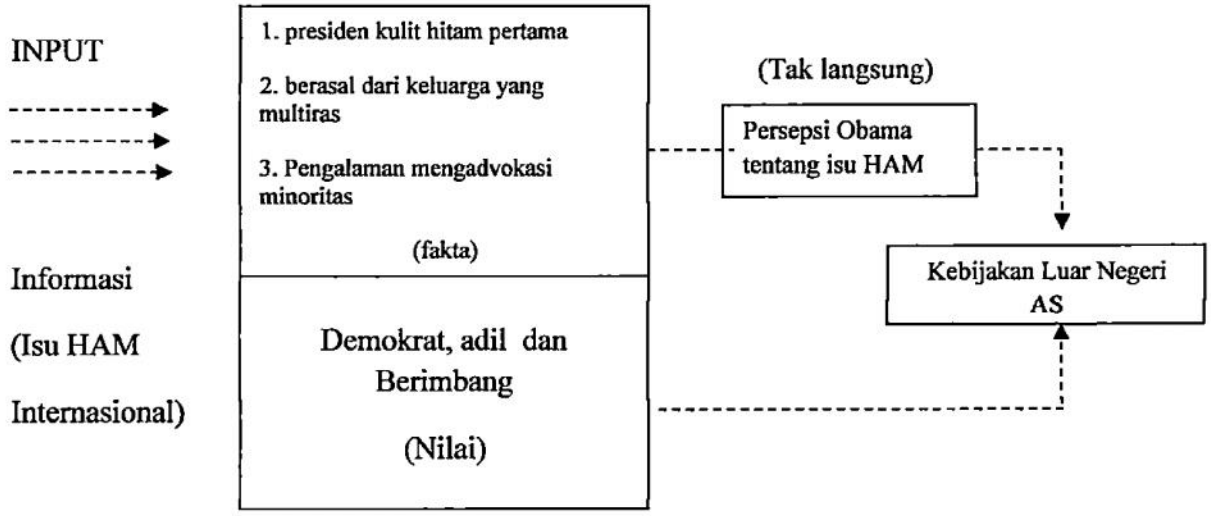

D. Hipotesa

Faktor yang menyebabkan perubahan cara pandang Amerika Serikat terhadap isu Hak Asasi Manusia setelah terpilihnya Barrack Obama sebagai presiden adalah sebagai berikut:

1. Perubahan cara pandang AS terhadap isu Hak Asasi Manusia dipengaruhi oleh persepsi Presiden Obama yang faktanya memiliki latar belakang yang berkorelasi positif dengan Hak Asasi Manusia.
2. Obama yang percaya pada nilai-nilai tentang dunia yang demokratis, adil dan berimbang membuatnya lebih mampu meghasilkan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan prnsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

E. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan cara pandang Amerika serikat terhadap isu hak asasi manusia semenjak barrack obama menjadi presiden. Penelitian ini juga sebagai upaya memperkaya kajian studi hubungan internasional yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia dalam hubungan internasional. Disamping itu, karya tulis ilmiah ini juga akan dijadikan tolok ukur sejauh mana hasil studi dan pemahaman penulis dalam menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebelum menyandang gelar kesarjanaan. Walaupun kemudian ukuran keberhasilan dalam studi bukanlah hanya ditentukan dari sebuah penelitian.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Lebih jauh, pembatasan dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan. Jangkauan penelitian ini difokuskan pada data-data yang di mulai dari setelah terpilihnya Obama sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2009 sampai dengan sekarang 2011, ketika obama akan memasuki tahun ketiganya memimpin Amerika.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian, ada beberapa hal yang mesti dicermati dan dilaksanakan guna mencapai hasil yang memuaskan dari penelitian kita. Inilah yang kemudian disebut dengan metode penelitian. Dengan berpedoman kepada metode-metode yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian kita nantinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif/ deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[17]

2. Sumber Data

Ada dua sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari objek penelitian.[18] Sumber data primer itu antara lain buku-buku yang spesifik membahas tema yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan data sekundernya penulis peroleh dari majalah, jurnal, internet, arsip-arsip, diktat perkuliahan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan lain-lain.

---

[17] Noh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hal. 63.
[18] Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Metode Dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 1990, hlm. 163.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *library research* (studi kepustakaan). Teknik ini adalah upaya pencarian data dengan menelusuri serta mengeksplorasi buku-buku serta sumber bacaan lain yang membahas secara langsung obyek yang akan diteliti lebih jauh. Disamping itu, bacaan umum yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan pembahasan penelitian juga ditambahkan untuk memperkuat argumentasi.

4. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian yg diambil, maka teknik analisa kualitatif yg menjadi pilihan. Dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Langkah-langkahnya diawali dengan membaca dan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber data yang terkait baik data primer atau sekunder yang ada kaitannya dengan HAM dan Amerika. Setelah itu, dilakukan penyederhanaan data untuk dapat diidentifikasi unsur-unsur mana yang penting dalam pertanyaan, memfokuskan pengumpulan data, sampel dan metode hingga sampai pada sebuah kesimpulan dalam bentuk abstraksi.

Tahapan berikutnya adalah memilih dan memilah data dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan ke dalam tema-tema yang lebih spesifik dengan tetap menjaga jangkauan pembahasan. Sedangkan langkah terakhir adalah berupaya memberikan perbandingan atau pemaknaan baru terhadap teks sebagai

bentuk analisa, sehingga kesimpulan yang diperoleh bisa merepresentasikan secara keseluruhan isi dari penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Agar mendapat gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai penyusunan skripsi ini maka digunakan sistematika penulisan. Keseluruhan tulisan ini akan dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I menjelaskan latar belakang masalah kenapa penelitian ini dilakukan, kemudian dari situ disimpulkan rumusan masalahnya. Bab ini juga menerangkan kerangka teori yang digunakan, hipotesa, jangkauan penelitian, serta metode penelitian.

BAB II memaparkan dinamika yang terjadi terkait dengan Politik Luar Negeri Amerika Serikat yang berkaitan dengan isu-isu Hak Asasi Manusia. Pada bab ini dijelaskan bagaimana situasi yang terjadi terkait HAM sebelum Obama terpilih menjadi Presiden AS. Bab ini juga secara khusus menjelaskan kebijakan Presiden Bush yang terkait HAM dan terpuruknya citra AS di masa pemerintahan Presiden Bush.

BAB III memaparkan beberapa perubahan yang terjadi di Amerika Serikat terkait dengan kebijakan AS dibawah kepemimpinan Presiden Barrack Obama. Perubahan tesebut dilihat dari perubahan kebijakan AS terhadap Irak dan Afghanistan, dan kebijakan Obama untuk penutupan kamp Guantanamo. Selain

itu, bab ini juga menjelaskan bagaimana Obama mempromosikan HAM dan demokrasi, serta hubungan Obama dengan dunia Islam.

BAB IV berisi penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cara pandang AS terhadap isu Hak Asasi Manusia. Pada bab ini, faktor-faktor tersebut terutama dilihat dari sisi Presiden Obama sebagai pemimpin negara yang turut dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman hidup Obama sendiri, serta pandangan-pendangannya tentang dunia yang ideal serta hak asasi manusia.

BAB V merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, isinya berupa kesimpulan dari bahasan-bahasan sebelumnya yang merupakan penegasan kembali dari pokok-pokok bahasan yang telah disampaikan.